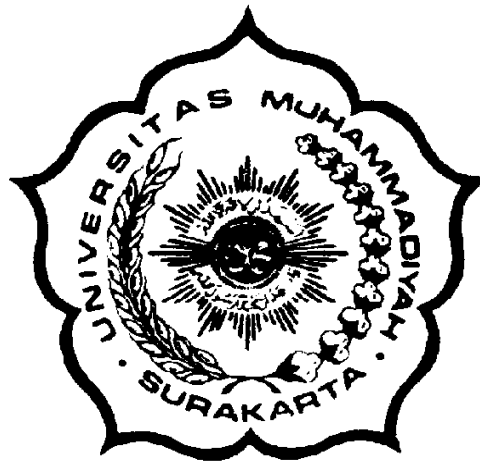


**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN
BATANG (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM
yang Terdaftar di KPP Batang)**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun oleh :

YULIYA RATNA FURI

B 200 100 196

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul :

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN
BATANG (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM
yang Terdaftar di KPP Batang)**

Yang ditulis oleh :

YULIYA RATNA FURI

B 200 100 196

Penandatanganan berpendapat bahwa Naskah Publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juli 2014

Pembimbing

(Drs. M. Abdul Aris, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Triyono, SE, M.Si, Ak)

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN
BATANG (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM
yang Terdaftar di KPP Batang)
YULIYA RATNA FURI**

(B200100196)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhamadiyah Surakarta

Email : yuliyaratnafuri@gmail.com

ABSTRACT

The results of this study aimed to determine the implementation of Government Regulation No. 46 Year 2013, to test whether there are differences in income tax payable before and after implementation of Government Regulation No. 46 Year 2013, to seek empirical evidence whether the differences in income tax benefit payable or not, to find empirical evidence of whether there is a difference Income tax due on business groups and grocery stores and clothing stores to find empirical evidence of whether there are differences in income tax payable on business groups and grocery stores clothing stores on the individual taxpayer UMKM registered in KPP Trunk. The sample used is the perpetrator or the owners of UMKM. Questionnaires were returned and can be processed as many as 100 questionnaires.

Data analysis technique used to test the hypothesis is different from the non-parametric test Wilcoxon Signed Ranks Test and Mann-Whitney Test. All data were acquired, processed with SPSS 17.00. which first tested using the classical assumption that normality test. In the classical assumption test showed that the data distribution is not normal.

Results of data from KPP Trunk show tax receipts implementation of PP No. 46 of 2013 to increase tax revenues in the Personal UMKM, because tax revenues increased by Rp167.065.286 or 13%. Application of PP 46 of 2013 on WPOP UMKM in KPP Trunk unfavorable for micro because pay more taxes but profitable for small and medium enterprises because they are taxed more lightly because the final rate of 1%. The results of the different test Wilcoxon Signed Ranks Test showed that there was difference in income tax payable at the individual taxpayer UMKM registered in KPP Rod before and after implementation of Government Regulation No. 46 Year 2013. Results of Mann-Whitney test Test showed that there was no difference in income tax payable on

business groups grocery stores and clothing stores registered in KPP rod when applying Regulation No. 46 Year 2013. Results of Mann-Whitney test Test showed that there was no difference in income tax payable on business groups grocery stores and clothing stores registered in KPP rod if using deemed profit.

Keywords: *Government Regulation No. 46 of 2013, Deemed Profit, Sales turnover, UMKM.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan tegaknya Negara Indonesia. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 huruf (a) UU No.28 tahun 2007).

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan mengeluarkan peraturan terbaru yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PP 46 sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Disinilah perlunya mengkaji lebih lanjut dengan melakukan perbandingan apakah mendapatkan pajak penghasilan terutang lebih tinggi atau lebih rendah menerapkan tarif sesuai PP 46 tahun 2013 atau sebaliknya lebih nyaman dengan kondisi tarif yang sesuai dengan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dengan tariff 25% (Diatmika I Putugede,2013).

B. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelakuUMKM yang terdaftar di KPP Batang.

- b. Menguji apakah terdapat perbedaan PPh terutang pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Batang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- c. Untuk mencari bukti empiris apakah perbedaan pada PPh terutang tersebut menguntungkan atau tidak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Batang.
- d. Untuk mencari bukti empiris apakah terdapat perbedaan PPh terutang pada kelompok usaha toko kelontong dan toko pakaian yang terdaftar di KPP Batang jika menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan jika menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 huruf (a) UU No.28 tahun 2007).

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UMKM ini mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga ekspor (Lusty,2012).

3. Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Norma penghitungan penghasilan neto adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebas yang merupakan standar umum besarnya penghasilan neto yang dianggap normal atau wajar, yang dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak (Mujiyati dan Aris, 2010 : 44).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp 4.8miliar dikenakan tarif sebesar 1%.(Diatmika I Putu Gede, 2013).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tersedia di KPP Batang yaitu data jumlah UMKM orang pribadi yang terdaftar dan penerimaan pajak WPOP pelaku UMKM tahun 2013 dan data primer berasal dari pembagian kuesoner pada WPOP pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Batang.

B. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Kabupaten Batang.

C. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Kabupaten Batang yang mempunyai peredaran bruto tidak melebihi dari Rp4,8miliar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Kabupaten Batang, data diperoleh melalui hasil wawancara dan pembagian kuesoner.
2. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data yang tersedia di KPP Batang yaitu data jumlah UMKM orang pribadi yang terdaftar dan penerimaan pajak WPOP pelaku UMKM tahun 2013.

E. Metode Analisis Data

1. Uji beda *Wilcoxon Signed Ranks Test*

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan PPh terutang pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Batang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013.

2. Uji beda *Mann-Whitney Test*

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan PPh terutang pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Batang jika menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan menguji apakah ada perbedaan PPh terutang pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Batang jika menggunakan Norma Penghitungan Penghasila Neto.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Batang

Penerapan PP 46 pada KPP Batang mulai di terapkan sejak berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu tanggal 1 Juli 2013. Penerimaan pajak sebelum penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2013 penerimaan pajak di KPP Batang sebesar Rp 559.026.149 atau 43,5%. Setelah Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 pada KPP Batang penerimaan pajak bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2013 naik menjadi Rp 726.091.435 atau 56,5%. Jadi pada KPP Batang PP Nomor 46 tahun 2013 dapat meningkatkan penerimaan pajak pada UMKM Orang Pribadi, karena setelah penerapan PP Nomor 46 tahun yaitu bulan Juli sampai dengan Desember penerimaan pajak meningkat sebesar Rp 167.065.286 atau 13%.

B. Perbedaan PPh terutang pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Batang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013

Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan PPh terutang pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Kabupaten Batang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini dibuktikan dari hasil uji beda Wilcoxon Signed Ranks Test yaitu nilai $asympt sig < \alpha$.

C. Perbedaan pada PPh terutang tersebut menguntungkan atau tidak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Batang

Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perbedaan PPh terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Batang bagi usaha mikro tidak menguntungkan karena dengan menerapkan PP 46 tahun 2013 usaha mikro harus membayar pajak sedangkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto usaha mikro dengan omzet kecil perhitungan pajaknya nihil karena harus dikurangi dengan ptkp. Untuk usaha kecil dan menengah merasa diuntungkan karena berapapun omset yang mereka dapat mereka hanya dikenakan tarif final sebesar 1%, sedangkan jika menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto penghitungannya menggunakan tarif progresif semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan.

D. Perbedaan PPh terutang pada kelompok usaha toko kelontong dan toko pakaian yang terdaftar di KPP Batang jika menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013

Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan PPh terutang pada kelompok usaha toko kelontong dan toko pakaian yang terdaftar di KPP Batang jika menerapkan PP Nomor 46 tahun 2013.. Hal ini dibuktikan dari hasil uji Mann-Whitney U di lihat pada output "Test Statistics"^a Nilai $-1,96 < Z \text{ hitung}$ dan nilai $Sig. 2-tailed > \alpha 5\%$.

E. Perbedaan PPh terutang pada kelompok usaha toko kelontong dan toko pakaian yang terdaftar di KPP Batang jika menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan PPh terutang pada kelompok usaha toko kelontong dan toko pakaian yang terdaftar di KPP Batang jika menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hal ini dibuktikan dari hasil uji Mann-Whitney U di lihat pada output “Test Statistics^a” Nilai $-1,96 < Z \text{ hitung}$ dan nilai Sig. 2-tailed $> \alpha$ 5%.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerapan PP 46 pada KPP Batang meningkatkan penerimaan pajak pada UMKM orang pribadi sebesar 13%.
2. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan PPh terutang pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Kabupaten Batang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini dibuktikan dari hasil uji beda Wilcoxon Signed Ranks Test yaitu (nilai asymp sig $< \alpha$) yaitu nilai asymp sig $0,000 < 0,05$.
3. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perbedaan PPh terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Batang bagi usaha mikro tidak menguntungkan karena dengan menerapkan PP 46 tahun 2013 usaha mikro harus membayar pajak sedangkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto usaha mikro dengan omzet kecil perhitungan pajaknya nihil karena harus dikurangi dengan ptkp. Untuk usaha kecil dan menengah merasa diuntungkan karena berapapun omset yang mereka dapat mereka hanya dikenakan tarif final sebesar 1%.
4. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan PPh terutang pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di

KPP Kabupaten Batang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini dibuktikan dari hasil uji beda Wilcoxon Signed Ranks Test yaitu ($\text{nilai asymp sig} < \text{nilai } \alpha$) yaitu nilai asymp sig $0,000 < 0,05$.

5. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan PPh terutang pada kelompok usaha toko kelontong dan toko pakaian yang terdaftar di KPP Batang jika menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hal ini dibuktikan dari hasil uji Mann-Whitney Udi lihat pada output "Test Statistics" (Nilai $-1,96 < Z \text{ hitung}$) yaitu (Nilai $-1,96 < -0,060$) dan (nilai Sig. 2-tailed $> \alpha 5\%$) yaitu ($0,952 > 0,05$).

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran bagi peneliti mendatang hendaknya agar lebih rinci jika meneliti UMKM dengan dibagi kedalam jenis usaha yakni usaha mikro, usaha kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Diatmika I Putu Gede, 2013. *Penerapan Akutansi Pajak Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Pajak Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jurnal Akutansi Profesi. Vol.3, No.2 Desember 2013.
- Direktorat Jenderal Pajak RI. 2012. Norma Penghitungan. www.pajak.co.id
- Direktorat Jenderal Pajak RI. 2012. Seri PPh - Norma Perhitungan Penghasilan Netto. www.pajak.co.id
- Direktorat Jenderal Pajak RI. 2013. PP.No.46 Tahun 2013. www.pajak.co.id
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi offset.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

- Isroah, 2013. *Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM*. Jurnal Nominal. Vol.II, No.1
- Izza, Ika Alfi Nur dan Ardi Hamzah, 2009. Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Study Interpretif. Simposium Nasional Akutansi (SNA)-XII Palembang.
- JAK Mr,2013.http://PPh_Final_1_Persen_PP_46_Tahun_2013_8_Hal_Yang_Perlu_Diketahui_Jurnal_Akuntansi_Kuangan.htm
- Lusty, 2012. *Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Pembangunan “Veteran”. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003, Perpajakan, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Media Keuangan. Strategi Membiayai Belanja Negara. www.kemenkeu.co.id
- Mujiyati dan Abdul Aris. 2011. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyo adi, 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Simposium Nasional Perpajakan II.
- Salim Muhammad, 2013.<http://partisipasi-pajak-dalam-pembangunan.html>
- Sekaran, Uma. 2006.*Metodologi PenelitianBisnis*. Jakarta: Salemba.
- Suparman, Raden Agus. Catatan Praktek Perpajakan. http://catatan_praktek_perpajakan_PP_46_Tahun_2013_Belum_Cukup.htm.diakses tanggal 5 Juli 2013.

Tambunan, Ruston. Ketentuan Terbaru Atas Pajak UMKM. [http://KetentuanTerbaruPajakPenghasilanAtasUMKM Sederhana ... - Artikel Ortax - your center of excellence in taxation.htm](http://KetentuanTerbaruPajakPenghasilanAtasUMKM.Sederhana...-ArtikelOrtax-yourcenterofexcellenceintaxation.htm). diakses tanggal 4 Juli 2013.

Trijaya Sindo, 2013. [http://Sindo Trijaya » Sektor UMKM Menyerap 97,3%25 Dari Total Tenaga Kerja Indonesia.htm](http://SindoTrijaya»SektorUMKMMenyerap97,3%25DariTotalTenagaKerjaIndonesia.htm)

-----Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

-----Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Zuhriah N, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*; Jakarta: PT Bumi Aksara.